

Fraksi Golkar Minta PAD Kutim Dioptimalkan



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Rabu,19/06/2024

SANGATTA – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur memberikan pandangan terhadap pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan APBD 2023.

Disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Golkar Kutim, Maswar bahwa pendapatan asli daerah menunjukkan realisasi sangat besar namun rasio presentase realisasi pendapatan asli daerah sebesar 44 persen menunjukkan masih belum tercapainya target.

Hal tersebut menjadi indikator bahwa masih terdapat kendala dalam penyerapan pendapatan asli daerah atau PAD. “Maka kami mohon agar untuk jenis pajak dan retribusi yang belum optimal penyerapannya agar dapat dilakukan optimalisasi penghitungan, pemantauan dan evaluasi, serta peningkatan target realisasinya,” tegasnya belum lama ini.

Menurut laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp8,59 triliun, berasal dari PAD sebesar Rp352,46 miliar, transfer sebesar Rp7,67 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp568,85 miliar.

Sehingga dikatakatan pendapatan daerah paling besar berasal dari pendapatan transfer dan lain-lain yang sah. Selain itu, pihaknya juga memberikan catatan berupa target RPJMD tahun ke-3 adalah pembangunan atau peningkatan jalan dengan predikat mantap masih belum terealisasi secara maksimal. Sehingga Pemerintah Daerah hendaknya bersinergi dan memaksimalkan kordinasi dengan kementerian terkait.

Kemudian, realisasi belanja modal sebesar Rp3,29 triliun atau tercapai 84 persen merupakan indikator positif. Namun untuk OPD prioritas yang melaksanakan kegiatan infrastruktur fisik pada belanja modal gedung dan bangunan, jalan, jaringan, serta irigasi

hendaknya pengawasan dapat dilakukan secara komprehensif menyeluruh baik kuantitas dan kualitasnya sesuai standar.

Tujuannya agar hasil akhir dari pembangunan dapat dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat secara maksimal serta memuaskan. Kemudian program lanjutan *MultyYears Contract* (MYC) yang sedang berjalan hendaknya dapat dilakukan akselerasi atau percepatan penyelesaian infrastruktur sesuai skema yang telah disetujui dan ditetapkan. “Hambatan atau kendala teknis harus dipetakan dan segera ditentukan alternatif solusinya,” paparnya.

Kelima, catatannya jumlah aset daerah yang sangat besar mencapai Rp18 triliun hendaknya tata kelola atau manajemen aset dijalankan secara optimal. Mulai dari pencatatan, pengadaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan dilaksanakan dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

“Terakhir, mengacu Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 4 agar pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dapat segera dilaksanakan dan dibahas mengingat jangka waktu pembahasan paling lambat bulan Juni,” pungkasnya. **(adv/ril)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Fraksi Golkar Minta PAD Kutim Dioptimalkan, 19/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (UU 12/2019) bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Dalam Pasal 1 angka 4 UU 12/2019 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.